

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur

1. Sejarah Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur

Kecamatan Kinal merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang terbentuk pasca-pemekaran Kabupaten Kaur dari Bengkulu Selatan melalui UU No. 3 Tahun 2003.¹ Wilayah ini yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi menjadi bagian dari Kabupaten Kaur pada Tahun 2003, awalnya Kinal adalah satu dari 7 kecamatan awal, dan kini termasuk dalam 15 kecamatan yang ada setelah Pemekaran Wilayah wilayah otonom.²

Kabupaten Kaur terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan, Kinal sudah terdaftar sebagai satu dari 7 kecamatan awal, bersama dengan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kaur Utara, dan lainnya. Seiring dengan berjalanya waktu dan kebutuhan Administratif, Kabupaten Kaur dimekarkan pada tahun 2005 menjadi 15 Kecamatan. Kecamatan Kinal tetap menjadi salah satu wilayah administratif kecamatan dalam struktur baru

¹ Pemprov Bengkulu, "Pemerintah Provinsi Bengkulu, Data Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu.," 2024.

² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaur, "Profil Diskominfo Kecamatan Kinal," 2025.

tersebut. Kecamatan Kinal memiliki beberapa Desa antara lain: Desa Jawi, Desa Gedung Wani, Desa Penandingan, Desa Geramat, Desa Tanjung Alam, Desa Tanjung Baru, Desa Pengurung, Desa Talang Berangin, Desa Papahan, Desa Pinang Jawa 1, Desa Pinang Jawa 2, Desa Gunung Terang, Desa Gunung Megang, Desa Talang Padang.³

2. Sejarah Singkat Desa Jawi, Gedung Wani, Talang Berangin

Desa Jawi merupakan sebuah Desa yang terletak dalam daerah kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Desa Jawi didirikan berdasarkan Perda Nomor 43 Tahun 2005 tanggal 5 Maret 2005. Yang sebelumnya termasuk kewilayah Desa Gedung Wani yang dimekarkan pada tahun 2005. Nama Desa Jawi berasal dari nama sebuah pohon yang tumbuh di pinggir Sungai air Kinal (Ayik Kinal) dikenal juga Lubuk Jawi.⁴

Gedung Wani merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berdirinya Desa Gedung Wani tidak ada catatan pasti. Perkiraan pada abad ke-18 kolonial Belanda masuk kedesa tersebut, baru muncul

³ Diskominfo Kabupaten Kaur Tahun 2021–2026, “Pemerintah Kabupaten Kaur, Rencana Strategis (RENSTRA),” 2021.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur Dalam Angka 2025,” 2025.

nama Gedung Wani yang sebelumnya bernama Jawi. Belanda saat itu menyebutnya wani=uang dan rumah panggung disebut gedung. Sehingga disinilah awal nama Gedung Wani atau Gudang uang.

Desa Talang Berangin terletak di Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Berdirinya desa ini berkaitan erat dengan sejarah perpindahan masyarakat. Asal Nama "Talang Berangin" berasal dari bahasa setempat. "Talang" merujuk pada pondok atau permukiman kecil di dekat ladang, sedangkan "Berangin" merujuk pada lokasi yang sejuk atau terbuka.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur

1. Bupati Kabupaten Kaur

Pemerintah kabupaten Kaur aktif mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan *Smart Government* melalui dasar hukum Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2021 dan regulasi terbaru (Perbup Nomor 78 Tahun 2023). Bupati mendorong integrasi layanan digital, termasuk kerja sama dengan Pemkab Gunung Kidul dan Universitas Amikom Yogyakarta untuk percepatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.⁵

Bupati Kaur terus mendorong kerjasama strategis dalam pembangunan jaringan, termasuk berkolaborasi

⁵ *Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).*

dengan penyedia data center (seperti PLN Icon Plus) untuk mendukung Smart City, Salah satu fokus implementasi SPBE adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (berdasarkan Perbup No 71 Tahun 2024) untuk mempercepat alur birokras.

2. Dinas Kominfo Kabupaten Kaur

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kaur berperan sebagai penggerak utama dalam transformasi digital pemerintahan, Aktif mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan layanan publik digital.

Dinas Kominfo melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai indeks SPBE Kabupaten Kaur. Penguatan Infrastruktur Pembangunan jaringan SPBE diinisiasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data dan efektivitas pemerintahan.⁶

Langkah strategis meliputi kerja sama antar daerah, rapat tim SPBE secara berkala, dan partisipasi dalam forum nasional (SPBE Summit) untuk peningkatan indeks SPBE, dengan adanya regulasi dan fokus kerja saat

⁶ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur, *Laporan Kegiatan dan Evaluasi SPBE Kabupaten Kaur*, (Kaur: Diskominfo, 2023).

ini, Diskominfo Kaur berupaya mengejar ketertinggalan dan mempercepat terwujudnya ekosistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.

3. Kecamatan Kinal

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Kinal, masih menghadapi beberapa tantangan utama, terdapat kendala dalam sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai di tingkat kecamatan.

SPBE di kecamatan diarahkan untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik, pelaporan harian, dan administrasi perkantoran agar lebih efisien dan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten, SPBE di Kecamatan Kinal masih dalam tahap pengembangan dan penguatan infrastruktur dasar untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang digital.

4. Camat Kinal

Camat Kinal mendukung implementasi SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat lokal. Camat Kinal turut serta dalam penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan penguatan SPBE di tingkat kecamatan termasuk Kecamatan Kinal, dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Kaur.

Salah satu agenda terkait peningkatan kesadaran dan arah kebijakan SPBE pernah dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kinal pada Maret 2023 Penguatan SPBE ini penting untuk meningkatkan indeks pelayanan publik di tingkat kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Kaur.

C. Visi dan Misi Kecamatan Kinal

1. Visi

Visi Kecamatan Kinal umumnya diselaraskan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur. Pada periode 2025-2029, visi Kabupaten Kaur adalah mewujudkan Kabupaten Kaur yang maju, masyarakat sejahtera, dan bahagia.

2. Misi

- a. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi tingkat kecamatan.
- c. Fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur desa, termasuk irigasi dan fasilitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Kinal.

- d. Mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup (termasuk kesehatan, pelayanan Posyandu, dan kader desa).

D. Program Kerja Kecamatan Kinal

1. Pembangunan Infrastruktur Desa: Prioritas pembangunan di Kecamatan Kinal difokuskan pada perbaikan dan perluasan akses transportasi masyarakat, serta pembangunan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
2. Peningkatan Keterampilan Masyarakat: Terdapat program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat di Kecamatan Kinal.
3. Pemberdayaan dan Pelayanan Publik: Melalui Seksi Ekbangsos (Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial) serta Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kecamatan aktif melakukan pendampingan dan peninjauan langsung ke desa-desa.
4. Sinergi Pembangunan Daerah: Program kerja kecamatan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun 2026, yang mencakup pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
5. Program Pendukung (KKN)⁷

⁷ Kominfo, "Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kaur, Pedoman Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," 2019.

E. Struktur Kantor Camat Kecamatan Kinal



F. Bentuk proker SPBE Kabupaten Kaur

1. Pemerintah Daerah

Program kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur difokuskan pada peningkatan kualitas, tata kelola, dan pemenuhan bukti aktual. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Kaur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE.⁸

⁸ Kominfo, “Kementerian Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kaur, Pedoman Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” 2019.

Berikut adalah beberapa bentuk proker SPBE terbaru di Kabupaten Kaur:

- a. Penerapan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi): Pemda Kaur tengah mempercepat penerapan aplikasi umum ini untuk tata kelola naskah dinas secara elektronik.
- b. Penguatan Tata Kelola SPBE: Penyusunan kebijakan internal dan tata kelola SPBE berdasarkan Perbup No. 78 Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas layanan.
- c. FGD (*Focus Group Discussion*) Peningkatan Kualitas SPBE: Kegiatan rutin untuk mendorong komitmen pimpinan instansi dan memastikan bukti aktual penerapan SPBE terdokumentasi dengan baik.
- d. Penguatan Kebijakan SPBE Nasional: Penyelarasan arah kebijakan SPBE lokal dengan agenda nasional untuk memperkuat digitalisasi di lingkungan Pemkab Kaur.

2. Dinas Kominfo

Bentuk program kerja (proker) SPBE dari Dinas Kominfo Kabupaten Kaur berfokus pada peningkatan indeks SPBE, penguatan infrastruktur digital, dan kolaborasi antarinstansi. Berikut adalah poin-poin proker SPBE terkini Dinas Kominfo Kabupaten Kaur :⁹

⁹ Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Kelola SPBE.

- a. Peningkatan Kualitas dan Bukti Aktual SPBE: Fokus utama adalah melengkapi bukti aktual (dokumentasi, kebijakan, dan implementasi) untuk meningkatkan nilai indeks SPBE, yang didorong melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi mandiri.
- b. Kerja Sama (MoU) Pengelolaan SPBE: Melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak lain (seperti Diskominfo Muara Enim) untuk mengoptimalkan sistem dan berbagi pakai infrastruktur.
- c. Pembangunan Infrastruktur Jaringan: Melanjutkan implementasi kebijakan tata kelola SPBE berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2021, termasuk pembangunan jaringan.
- d. Implementasi SPBE Nasional & *GovTech*: Menyesuaikan proker lokal dengan arahan pusat, termasuk peluncuran dan adopsi aplikasi/layanan digital yang terpadu.
- e. Peningkatan Kapasitas SDM: Menggelar pertemuan untuk memperkuat pemahaman aparatur mengenai alur kerja SPBE dan tata kelola berbasis digital.

Proker ini bertujuan agar layanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaur lebih efektif, efisien, dan terintegrasi melalui teknologi.

3. Kecamatan Kinal

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kaur, serta dengan adanya searah kebijakan dan bentuk program kerja (proker) yang diimplementasikan di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Kinal.¹⁰

1. Digitalisasi Administrasi dan Pelayanan Publik

- a. Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE): Penggunaan TTE pada surat-menyurat resmi tingkat kecamatan untuk mempercepat birokrasi.
- b. Digitalisasi Data Kependudukan: Optimalisasi penginputan dan akses data kependudukan secara digital agar terintegrasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur.

2. Peningkatan Layanan Berbasis Teknologi (E-Government)

- a. Optimalisasi Website/Aplikasi Desa/Kecamatan: Penggunaan aplikasi untuk pelaporan pelayanan publik, pelayanan surat keterangan, dan pengaduan masyarakat secara daring.
- b. Penyediaan Data Aktual: Fokus pada pengumpulan data riil di tingkat desa/kecamatan

¹⁰ Dokumen Pelaksanaan Program SPBE Tingkat Kecamatan.

untuk diunggah ke sistem pusat, meningkatkan kualitas data SPBE.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Pelatihan bagi aparatur kecamatan dan desa di wilayah Kinal untuk mengoperasikan sistem informasi desa, aplikasi perkantoran, dan keamanan data.

4. Peningkatan Infrastruktur Jaringan

Peningkatan Akses Internet: Upaya pemenuhan kebutuhan internet yang stabil di kantor kecamatan untuk mendukung kelancaran pelayanan daring.

